

**FINANCIAL DISTRESS PADA PEMERINTAH PROVINSI: KAJIAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH****Yuliana Sari<sup>1)</sup>, Evada Dewata<sup>2\*)</sup>, Hadi Jauhari<sup>3)</sup>**<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya<sup>3</sup>Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya

\*E-mail: evada78@polsri.ac.id

**Abstract**

*This study tries to prove how the influence of the financial self-sufficiency of local governments and the age of provincial governments in Indonesia on financial distress. The research population for all provincial governments in Indonesia for the 2017-2021 period used secondary data sourced from financial reports audited by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia. Using a saturated sample, the data is processed by multiple regression analysis. The results show that the financial self-sufficiency of local governments has no significant effect on financial distress. In contrast, the age of the local government has a significant negative effect on financial distress. This finding has implications for the provincial government, one of the steps to anticipate the occurrence of financial pain, so that the provincial government continues to manage all regional financial affairs effectively and efficiently is to make policies to prioritize spending not only for personnel expenditure but also for capital expenditure.*

**Keywords:** *the financial self-sufficiency of local governments, financial distress, the age of the local government*

**PENDAHULUAN**

Financial distress pada sektor pemerintahan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007; Yanti, 2018), menunjukkan kegagalan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat (Rohayatin dkk, 2017). Banyak faktor yang menyatakan ketidakmampuan pemerintah ini diantaranya bahwa pemerintah tidak memiliki ketercukupan dana, alokasi belanja modal lebih banyak untuk belanja pegawai (Dwitayanti dkk., 2020), adanya kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan meningkatnya biaya pegawai (K.Urahn et al, 2013).

Selama tahun 2017-2021, memotret kondisi penyerapan belanja modal di pemerintahan provinsi Indonesia masih rendah, terbukti besaran perbandingan rasio belanja modal terhadap total belanja mulai tahun 2017 sebesar 20%, tahun 2018 sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 21%, tahun 2020 sebesar 17% dan tahun 2021 sebesar 16%, dengan persentase rata-rata selama 5 tahun yaitu 18,8% (BPK, 2023). Angka ini masih dibawah standar yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal infrastruktur publik minimal 40% dari total APBD. Kondisi kekurangan atau ketidaktersediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan atau mengalami *financial distress* atau terjadi ketidaksimbangan antara beban dan pendapatan secara berkelanjutan.

Tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya financial distress, karena dalam pengelolaan keuangan publik, kendala penganggaran biasanya dibatasi sumber-sumber pendapatan daerah, terkadang prioritas belanja menjadi kunci untuk menyiasati kendala penganggaran. Data kemandirian keuangan ini bisa diperoleh melalui data laporan keuangan, karena memberikan relevan informasi kesulitan keuangan (Brusca, Rossi, & Aversano, 2015). Tingkat kemandirian keuangan dapat dilihat melalui rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan (Illahi dkk, 2021). Menurut Windiyanti & Isfaatun (2019); Pangku & Radjak (2021); Ningrum & Sholihah (2023), tidak terdapat pengaruh kemandirian keuangan terhadap financial distress. Elfiyana & Arza (2022) menunjukkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress, semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah menunjukkan besarnya kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dengan merencanakan belanja modal untuk meningkatkan pelayanan prima, sehingga probabilitas terjadinya financial distress menjadi lebih rendah (Wicaksono, 2015), sebaliknya menurut Sari & Arza (2019), kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap financial distress karena pemerintah tidak selalu mengoptimalkan belanja modal melainkan lebih banyak untuk belanja rutin.

Umur pemerintah daerah menjadi indikator menarik untuk diteliti mengingat kondisi sosial-ekonomi pemerintah daerah yang beraneka ragam Indonesia. Syurmita (2014) dalam temuannya menyatakan semakin lama umur pemerintah daerah maka dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah tersebut baik dan berarti resiko terjadi financial distress semakin kecil. Umur pemerintahan dengan status otonomi baru cenderung akan mengalami financial distress, salah satunya karena penyalahgunaan wewenang yang terjadi di pemerintah daerah (Windiyanti & Isfaatun, 2019), didukung Wulandari & Arza (2020) dan Indriaty, Setiawan & Pravasanti (2019), umur pemerintahan daerah berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sebaliknya Zakia & Setiawan (2021) mengungkap ukuran wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress.

Novelty penelitian ini yaitu dilakukan pada pemerintah provinsi, karena topik financial distress banyak dilakukan pada perusahaan publik/swasta. Fenomena banyaknya pemerintah daerah di Indonesia yang lebih menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai dari tahun ke tahun, dapat memungkinkan pemerintah daerah akan mengalami kondisi financial distress. Pemerintah daerah dapat mengurangi atau terhindar dari resiko kebangkrutan dengan mengatasi financial distress (Pangku & Radjak, 2021) dengan menghitung berapa proporsi belanja daerah yang dialokasikan pada periode tahun anggaran (Suhaedi, 2019). Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat kemandirian keuangan dan umur pemerintah terhadap financial distress pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya financial distress, khususnya dilihat dari tingkat kemandirian keuangan dan umur pemerintah provinsi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah variabel dependen financial distress sebagai variabel dependen dan Kemandirian Keuangan dan Umur Pemerintah Daerah sebagai variabel independen. Financial Distress menurut Jones & Walker (2007) sebagai suatu kondisi dimana pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan rumus (Zakia & Setiawan, 2021):

$$\text{Financial Distress (FD)} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber keuangan dari pendapatan asli daerah untuk pemenuhan kebutuhan belanja daerah, bahwa semakin besar angka pendapatan asli daerah maka kemandirian daerah semakin besar dengan rumus (Illahi dkk, 2021):

$$\text{Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

Umur Pemerintah Daerah (AG), menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Syurmita (2014), semakin lama umur pemerintah daerah maka dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah tersebut baik.

Populasi dan sampel penelitian menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi, menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi laporan keuangan tahun 2017-2021 di laman Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan dari *website* Direktorat Jendral Otonomi Daerah (<http://otda.kemendagri.go.id/>).

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Model regresi linier yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut:

$$FD = \alpha + \beta_1 KKD + \beta_2 AG + e$$

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yaitu

Ha: Tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap financial distress pemerintah provinsi di Indonesia.

Hb: Umur pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap financial distress pemerintah provinsi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 berikut ini menyatakan keadaan variabel penelitian yaitu financial distress, tingkat kemandirian keuangan dan umur pemerintah provinsi di Indonesia.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FD	165	5.24	31.91	18.4750	6.10990
KKD	165	12.81	162.20	47.4116	27.11733
AG	165	5.00	71.00	51.3879	18.67814

Sumber: Output SPSS, 2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk rasio financial distress paling besar terjadi pada tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 31,91%, dan paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan rasio 5,24% oleh provinsi Jawa Tengah, artinya Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki ketidakmampuan untuk memberi pelayanan publik secara optimal sesuai standar mutu pelayanan. Sebaliknya Provinsi Jawa Tengah menjadi pemerintah provinsi yang telah memberikan pelayanan prima secara maksimal bagi masyarakatnya. Untuk tingkat kemandirian keuangan, mean menunjukkan sebesar 47,41%. Nilai mean menunjukkan terjadinya penyebaran data yang baik karena nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi. Begitupun dengan umur pemerintah provinsi dengan nilai mean sebesar 51,38 yang lebih besar dari standar deviasi, dengan umur pemerintah terbaru berdiri selama 5 tahun dan yang terlama berdiri selama 71 tahun.

Selanjutnya sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka dilakukan uji asumsi klasik berupa ujian normalitas data, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi, dan semua dinyatakan diada yang dilanggar. Berikut selanjutnya Tabel 2, hasil uji t untuk menjawab hipotesis penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	23.277	1.411		16.496	.000
1	KKD	-.027	.018	-.119	-1.486	.139
	AG	-.069	.026	-.210	-2.620	.010

a. Dependent Variable: FD

Sumber: Output SPSS

Tabel 2 menampilkan model persamaan penelitian berikut ini:  $Y = 23,277 - 0,027 \text{ KKD} + 0,069 \text{ AG}$   
 Persamaan tersebut menunjukkan jika variabel AG dan KKD memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel FD sebesar 23,277. Nilai koefisien variabel tingkat kemampuan keuangan (KKD) sebesar 0,027 dan bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan (KKD)

mempunyai hubungan yang berlawanan dengan Financial Distress (FD). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan tingkat kemampuan keuangan (KKD) satu satuan maka variabel Financial Distress (FD) akan turun sebesar 0,027 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Begitupun Nilai koefisien umur pemerintah daerah sebesar 0,069 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah (AG) mempunyai hubungan yang searah dengan Financial Distress (FD). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan umur pemerintah daerah (AG) satu satuan maka variabel Financial Distress (FD) akan naik sebesar 0,069 satuan, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Berdasarkan tabel 2 juga menunjukkan bahwa hipotesis  $H_a$  yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap financial distress pemerintah provinsi di Indonesia tidak dapat didukung. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig untuk KKD adalah 0,139. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai  $0,139 > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemandirian keuangan (KKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress (FD). Dengan arah negatif, maknanya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah provinsi yang tinggi, belum tentu akan menyebabkan financial distress yang tinggi atau dengan kata lain tingkat kemandirian keuangan yang tinggi akan menyebabkan rendahnya financial distress.

Pada hipotesis  $H_b$  yang menyatakan bahwa umur pemerintah (AG) daerah berpengaruh negatif terhadap financial distress pemerintah provinsi di Indonesia terdukung. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig pada financial distress adalah 0,010. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai  $0,010 < 0,05$ , maka  $H_b$  diterima, dengan nilai koefisien sebesar 0,069 dan bertanda positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel umur pemerintah berpengaruh negatif terhadap financial distress.

## **Pembahasan**

Hipotesis  $H_a$  tidak dapat didukung hal ini karena nilai sig untuk tingkat kemampuan keuangan (KKD) sebesar 0,027. Nilai sig  $0,139 > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemampuan keuangan (KKD) tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hal ini senada dengan penelitian Pangku & Radjak (2021); Windiyanti & Isfaatun (2019); Ningrum & Sholihah (2023). Temuan penelitian ini mengindikasikan tidak adanya pengaruh tingkat kemandirian pada pemerintah provinsi di Indonesia, dimungkinkan karena masih rendahnya potensi ekonomi daerah dan kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif yaitu berada rata-rata 47,41% (tabel 1). Temuan ini juga membuktikan bahwa tingginya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak selalu dapat meningkatkan alokasi belanja modal untuk prioritas pembangunan di masyarakat sehingga dapat menurunkan kondisi financial distress, ataupun sebaliknya atau dengan kata lain tingginya pendapatan asli daerah bukan sebagai pilihan utama untuk

mendukung kemandirian sumber daya keuangan pemerintah daerah. Temuan menunjukkan tidak adanya pengaruh tingkat kemampuan keuangan pada pemerintah provinsi di Indonesia, dengan rata-rata tingkat kemandirian daerah sebesar 47,41% artinya terpola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Implikasi teoritis temuan ini bahwa tingkat kemandirian keuangan tidak selalu mampu mencerminkan kemampuan besarnya pendapatan asli daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan daerah, terlihat belum konsistennya pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk proporsi belanja daerah, oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah khususnya provinsi untuk mulai mencari alternatif pembiayaan yang tidak hanya bersumber dari PAD secara efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah sesuai amanah Nomor 32 tahun 2004, temuan

Hipotesis H<sub>b</sub> dapat didukung hal ini karena nilai sig untuk umur pemerintah daerah (AG) sebesar 0,010. Nilai sig  $0,010 < 0,05$ , maka H<sub>a</sub> diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel umur pemerintah daerah (AG) berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Hasil ini menunjukkan bahwa umur pemerintahan berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Temuan ini mendukung Syurmita (2014) dan Windiyanti & Isfaatun (2019) bahwa umur pemerintahan dengan status otonomi baru cenderung akan mengalami financial distress, salah satunya karena penyalahgunaan wewenang yang terjadi di pemerintah daerah. Temuan penelitian ini bertentangan dengan Zakia & Setiawan (2021) yang menunjukkan ukuran wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Hasil penelitian ini menegaskan semakin lama suatu pemerintahan daerah berdiri maka pemerintah daerah ini tidak akan bergantung pada dana dari pemerintah pusat ataupun provinsi dan cenderung untuk tidak mengalami financial distress dan semakin lama pemerintahan daerah berdiri maka semakin siap pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

## **SIMPULAN**

Dari temuan penelitian ini, dapat diketahui tingkat kemampuan keuangan (KKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress terbukti masih rendahnya angka rata-rata tingkat kemandirian pemerintah provinsi yaitu sebesar 47,41%, sedangkan umur pemerintah daerah (AG) berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress, sebagai pembuktian semakin tua umur pemerintah provinsi atau semakin lamanya suatu pemerintah provinsi itu berdiri maka dapat dikatakan bahwa pemerintah provinsi tersebut telah berhasil mengatasi segala hambatannya dengan pengalaman financial yang didapatnya.

## IMPLIKASI TEORITIS DAN MANAJERIAL

Implikasi penelitian ini menguatkan secara teoritis bahwa tingkat kemandirian keuangan tidak selalu mampu mencerminkan kemampuan besarnya pendapatan asli daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan daerah, maka penting bagi pemerintah provinsi terus mengelola segala urusan keuangan daerah dan mencari alternatif pembiayaan untuk melaksanakan program kerja dengan memprioritaskan pada belanja modal agar dapat mengurangi terjadinya financial distress.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). Drivers for the financial condition of Local Government: a comparative study between Italy and Spain. *Lex Localis*, 13(2), 161
- Elfiyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress di Indonesia. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 4(2), 425-437.
- K.Urahn, S., Ettlinger, M., Atwell, M. S., Fehr, S., Huh, K., & Russel, A. (2013). The State ROLE Local Government Financial Distress. The Pwoer Charitabel Trust.
- Ningrum, D. T., & Sholihah, R. A. (2023). The Influence Of Financial Factors And Local Government Characteristics On Financial Distress. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 098-112.
- Indriaty, N., Setiawan, D., & Pravasanti, Y. A. (2019). The Effects Of Financial Ratio, Local Size And Local Status On Financial Distress. *International Journal Of Economics, Business And Accounting Research (Ijebar)*, 3(01), 38-42.
- Pangku, M., & Radjak, L. I. (2021). Analisis Financial Distress Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018. *Jsap: Journal Syariah And Accounting Public*, 4(1), 1-8.
- Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Caraka Prabhu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 22 - 36. <https://doi.org/10.36859/Jcp.V1i01.50>
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425-1436.
- Septyaningtyas, D. P., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 984-990.
- Syurmita. 2014. Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. SNA XVII. Mataram.
- Windiyaniti, R., & Isfaatun, E. (2019). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Rasio Solvabilitas, Kompleksitas, dan Umur Pemerintahan Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Kewirausahaan*, 15(02).
- Wicaksono, adhi. 2015. Financial Distress pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. e-journal digilib UNS. Tesis.
- Wulandari, Y., & Arza, F. I. (2020). The Effect of Financial Factors and Local Government Characteristics on Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3179–3196. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.276>
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 653-671.